

UPAYA ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) DALAM MENANGANI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI INDIA (2011-2015)

Selma Intania Hafidha

Program Studi Ilmu Hubungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

selmahafidha@gmail.com

Abstract

Child labor is one of the problems that almost occurs in developing countries. One of the countries that still has the level of child labor is India. Many factors have caused many levels of child labor in the world. One of the most dominating factors is poverty. Poverty then requires parents to train their children to make ends meet. This then became the focus of the United Nations (UN) body, the International Labor Organizations (ILO) to reduce and even eliminate child labor in several developing countries in the world. The ILO then launched a program namely IPEC Program to reduce and even eliminate child labor in several countries in the world, especially in India. In addition to launching a program, the ILO also has an active role in establishing cooperative relations with the Indian government with the aim of agreeing on the child labor law also requiring the State to ratify the conventions compiled by the ILO.

Key Words: India, Child Labor, International Labor Organizations, IPEC Program

ABSTRAK

Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan yang hampir terjadi di negara berkembang. Salah satu negara yang masih tingkat pekerja anaknya yaitu India. Banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya tingkat pekerja anak di dunia. Salah satu yang paling mendominasi yaitu faktor kemiskinan. Kemiskinan tersebut kemudian mengharuskan orang tua untuk memperkejakan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan. Hal tersebut kemudian menjadi fokus badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu International Labour Organizations (ILO) untuk mengurangi bahkan menghapus pekerja anak di beberapa negara berkembang di dunia. ILO kemudian mencanangkan sebuah program yaitu IPEC Program untuk mengurangi bahkan menghapus pekerja anak yang ada di beberapa negara di dunia, khususnya di India. Selain mencanangkan sebuah program, ILO juga berperan aktif untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah India dengan tujuan untuk menyepakati terkait undang-undang pekerja anak juga mengharuskan negara untuk meratifikasi konvensi yang telah disusun oleh ILO.

Kata Kunci: India, Pekerja Anak, Organisasi Buruh International, Program IPEC

PENDAHULUAN

International Labour Organization (ILO) merupakan salah satu badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah perburuhan seperti masalah ketenagakerjaan, pekerja anak, waktu kerja, dan lainnya. ILO mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. ILO adalah badan global yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi

standar-standar ketenagakerjaan internasional. ILO telah bekerjasama dengan 181 negara di dunia yang berupaya untuk memastikan bahwa standar-standar dalam ketenagakerjaan telah diterapkan ataupun dihormati oleh perusahaan-perusahaan yang ada didunia. (Putri, 2016)

Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan. Pada tahun 1944, sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun sebuah tujuan dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana.

Pada tahun 1998, para delegasi yang menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference) mengadopsi deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. Prinsip dan hak ini adalah hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Berdasarkan deklarasi ini, Jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di

tempat kerja merupakan hal penting karena jaminan ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut secara bebas dan atas dasar kesetaraan peluang. (International Labour Organization, 2007)

Permasalahan eksploitasi pekerja anak merupakan salah satu fokus kerja ILO. Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Pemaksaan terhadap anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (inter play) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas. (Jurnal UIN Surabaya, 2014)

Pekerja anak adalah pelanggaran hak asasi anak dan merupakan kendala utama bagi kerja layak berkelanjutan untuk pembangunan dan noda kemanusiaan. Anak-anak harus dilindungi dari bahaya. Pekerja anak menimbulkan masalah yang serius pada kesehatan. Anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan mereka, juga fisik dan psikologis anak.

Ada lebih dari 200 juta anak yang bekerja di seluruh dunia, dan sebagian besar dari mereka bekerja penuh waktu. Mereka telah kehilangan hak-hak untuk memperoleh pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik juga kebebasan. 126 juta dari mereka atau

seperduabelas anak-anak di seluruh dunia terekspos bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya untuk anak yang membahayakan fisik, mental, dan moral mereka. (International Labour Organization, 2017)

PEMBAHASAN

1. Pekerja Anak di India (2011-2015)

Statistik terkini yang tersedia dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang pekerja anak menyajikan gambaran penuh harapan. Jumlah pekerja anak ditemukan menurun di banyak Negara di dunia. Pada bagian Afrika Sub-Sahara, jumlah anak yang aktif secara ekonomi telah meningkat. Sementara di Asia dan wilayah pasifik, penurunan jumlah pekerja anak adalah yang tertinggi di dunia. Analisis data sensus di India, secara berturut-turut menunjukkan bahwa rasio pekerja anak terhadap total populasi di negara India telah menurun dari 1,37 persen pada tahun 1991 menjadi 0,36 persen pada tahun 2011 dan hal tersebut juga berlaku untuk negara bagian. (Jena, 2016)

Sesuai sensus tahun 2011, India memiliki sekitar 43,5 lakh pekerja anak pada tahun 2011 turun dari sedikit lebih dari satu crore pada tahun 1971. Dalam sensus India tahun 2011 menyajikan gambaran yang berbeda jika dibandingkan dengan statistik tentang pekerja anak yang disajikan sebelumnya. Sejak tahun 1971 dan seterusnya, setiap statistik sensus menyajikan tenaga kerja anak lebih dari 10 juta atau satu crore. Sementara dalam sensus 2011, dapat diamati bahwa tenaga kerja anak telah dilaporkan di bawah 5 juta jiwa. Hasil tersebut adalah hasil yang signifikan dari berbagai kebijakan dan upaya sejumlah organisasi Pemerintah dan Non-

Pemerintah yang sama-sama ditujukan untuk memerangi ancaman terhadap pekerja anak. (Jena, 2016)

Pada tahun 2011 Jumlah pekerja anak di India menurun menjadi 4,5 juta dari 12,6 juta pada dasawarsa sebelumnya, kata Menteri Ketenagakerjaan India, Bandaru. (International Labour Organization)

Pada tahun 2012, India membuat kemajuan moderat dalam upaya untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan dapat merugikan anak. Pemerintah mengesahkan undang-undang baru untuk melindungi anak-anak dari pelanggaran seksual dan anak-anak dan orang dewasa dari perdagangan dan kerja paksa. Pemerintah juga membentuk anti perdagangan baru unit yang bertanggung jawab untuk menangkap pedagang anak, juga memperluas jangkauannya. Selanjutnya yaitu hak Undang-Undang Pendidikan untuk memasukkan anak-anak penyandang cacat dan terus mendanai Proyek Pekerja Anak Nasional (NCLP). Namun, perlindungan hukum dasar untuk anak-anak tetap lemah. (Childlineindia.org)

Pada tahun 2013, International Labour Organization (ILO) memperkirakan ada sekitar 215 juta anak-anak antara usia lima hingga empat belas tahun yang bekerja di seluruh dunia, termasuk juga di India. Anak-anak tersebut sering diperlakukan dengan tidak semestinya dan bekerja untuk waktu yang lama, juga dalam kondisi yang sangat buruk. Hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan anak-anak baik secara fisik, mental ataupun emosional. Anak-anak ini tidak memiliki hak dasar seperti akses sekolah atau perawatan kesehatan. Menurut data ILO tahun 2013, jumlah pekerja anak terus meningkat walaupun sudah dilarang secara hukum. Pemerintahan dalam suatu negara juga tidak membuat peraturan untuk

melindungi anak-anak yang ada dalam negara tersebut. (Harsh Adithya Poddar)

Pada tahun 2015 jumlah pekerja anak di India kembali meningkat. Menurut data yang dirilis oleh International Labour Organization (ILO) pada Februari 2015 lalu menunjukkan bahwa pekerja anak di India yang berusia 5 hingga 17 tahun mencapai 5,7 juta. (rmol.co, 2016)

Menurut CIA pada Juli 2015, anak-anak terdiri dari 28,09% dari total populasi yang hampir sepertiga dari populasi negara. Sejumlah besar anak-anak hidup dalam kondisi yang serba kekurangan dan rentan. Seperti dicatat oleh CSO pada September 2012 peningkatan absolut dari 181 juta populasi negara telah dicatat selama dekade 2001-2011, ada pengurangan 5,05 juta populasi anak-anak berusia 0-6 tahun. Selama periode ini terjadi penurunan jumlah pada anak laki-laki yaitu 2,06 juta dan pada anak perempuan yaitu 2,99 juta. Antara periode 2009-2013, sebanyak 1.387.000 anak-anak tercatat tidak mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar. Sensus menemukan peningkatan jumlah pekerja anak dari 11,28 juta pada tahun 1991 menjadi 12,66 juta pada tahun 2001.

Terdapat beberapa faktor sosial ekonomi yang menyebabkan adanya pekerja anak di banyak Negara di dunia. Beberapa diantaranya :

1. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu akar penyebab yang menyebabkan adanya pekerja anak. Keadaan strata sosial yang berbeda mempengaruhi adanya pekerja anak tersebut. Menurut Bhat & Rather, Penelitian telah menunjukkan bahwa alasan yang paling menonjol adalah kemiskinan. Keputusan tentang anak harus bekerja atau sekolah umumnya dibuat oleh orang

tua. Jika pendapatan keluarga di bawah garis kemiskinan, orang tua berpikir bahwa anak-anak juga harus berkontribusi dalam pendapatan keluarga mereka. Menurut Basu pada tahun 1998 menjelaskan tentang menggunakan model teoritis tentang pekerja anak, di mana ia menunjukkan satu-satunya alasan orang tua mengirim anak-anak ke pekerja adalah karena pendapatan mereka yang rendah. Akibat kurangnya pendapatan orangtua, menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai sekolah untuk anak-anak mereka. Dengan demikian, sebagian besar rumah tangga miskin harus mengirim paksa anak-anak mereka untuk bekerja.

2. Ukuran keluarga. Keterlibatan anak-anak dalam rumah tangga kurang mampu biasanya lebih berpengaruh pada pekerja anak. Orang tua mewajibkan anak-anak mereka untuk bekerja karena mereka tidak mampu mengelola tuntutan keluarga.
3. Kondisi keluarga. Ada banyak anak yang sedang tumbuh kemudian kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya dan mereka juga terkena dampak HIV/AIDS dalam keluarga. Anak-anak dipaksa bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan saudara mereka
4. Faktor tradisional atau budaya. Budaya adalah faktor lain yang memaksa anak masuk ke dalam pasar kerja. Budaya yang berbeda dari banyak masyarakat membuat anak-anak mulai bekerja pada usia yang sangat muda yang terkait dengan tradisi dan faktor budaya. Mereka berasumsi bahwa anak-anak perlu belajar keterampilan yang dapat menjadi baik untuk masa depan mereka.

5. Korupsi. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Korupsi memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan, merusak pembangunan manusia dan stabilitas dan menopang konflik, melanggar hak asasi manusia, dan mengikis fungsi demokrasi Negara. Korupsi dapat memiliki efek yang sangat negatif pada hak anak-anak yang merampas layanan dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
6. Perang saudara. Perang saudara menghancurkan ekonomi negara, juga menjadikan seseorang menjadi jauh lebih miskin karena semua sumber daya digunakan untuk perang. Perang dapat membakar semua hal baik yang dimiliki negara. Hal tersebut menimbulkan kemiskinan, kerusakan, dan banyak hal mengerikan lainnya.
7. Migrasi perkotaan. Banyak keluarga pedesaan bermigrasi ke daerah perkotaan karena desakan pedesaan dan faktor penarik perkotaan. Sebagai akibatnya, mereka sering dipaksa untuk hidup dan bekerja di jalan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung dan lain sebagainya. Dalam hal ini, anak-anak dilibatkan menjadi pekerja jalanan sebagai penjaja.
8. Globalisasi. Globalisasi adalah penyebab lainnya dari pekerja anak. Globalisasi telah membawa dampak buruk pada pekerja anak di negara-negara berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan internasional yang memindahkan produksinya ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini sering mempekerjakan anak-anak sebagai pekerja murah mereka juga patuh melaksanakan perintah yang diberikan oleh

majikan mereka bahkan ketika mereka dilecehkan dan dieksploitasi sekalipun.

9. Hubungan antara pekerja anak, pendapatan keluarga dan Pendidikan: Kurangnya pendidikan atau kualitas pendidikan yang buruk adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya insiden pekerja anak. Pendidikan dianggap sebagai salah satu alternatif utama untuk menghapuskan pekerja anak. Pendapatan keluarga mempengaruhi pendidikan anak, namun apabila orang tua tidak mampu membayar, anak-anak dipaksa untuk bekerja.
10. Biaya kesempatan pendidikan: Biaya pendidikan adalah masalah lain dalam rumah tangga masyarakat yang kurang mampu. Biaya pendidikan juga berkontribusi pada eksploitasi anak. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu menjauhkan anak-anak dari pekerjaan. Namun bagi banyak orang tua miskin sulit untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah karena keterbatasan biaya. Para orang tua tidak mampu membayar biaya sekolah, seragam, atau biaya tambahan lainnya. (Roy, 2017)

2. Undang-Undang tentang Pekerja Anak

Pada tahun 2016, pemerintah India mengeluarkan sebuah Undang-Undang tentang diperbolehkan anak berumur 14 tahun untuk bekerja membantu orang tuanya. Hal tersebut kemudian mendapatkan respon dari PBB terkait UU tersebut. Dengan adanya hal ini, India dikecam karena parlemen mengizinkan sejumlah amandeman kontroversial terhadap rancangan undang-undang tenaga kerja anak-anak. Badan PBB yang bergerak dalam ranah anak-anak menolak adanya

rancangan undang-undang yang baru yang memberikan izin untuk anak bekerja, walau dengan adanya pengecualian yaitu usaha keluarga. (BBC Indonesia, 2016)

Amandemen terhadap UU Larangan Pekerja Anak di India bertujuan memungkinkan anak di bawah usia 14 tahun bekerja dalam ‘perusahaan keluarga’ seperti industri pembuatan karpet, penggulungan rokok beedi atau penggosokan permata. Pemerintah India beralasan ini akan membantu keluarga miskin mencari uang dan memberi anak-anak untuk semangat berwirausaha. Membiarkan anak bekerja hanya bisa dianggap legal bila pekerjaan itu tidak mengganggu pendidikan mereka dan pekerjaan itu tidak berbahaya.

Pada tahun 2017, India membuat kemajuan yang signifikan dalam upaya menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak. Pemerintah meratifikasi Konvensi ILO 182 dan Konvensi 138 dan mengamandemen Undang-Undang Pekerja Anak untuk melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk bekerja. Pemerintah juga meluncurkan *Platform* untuk menegakkan undang-undang pekerja anak dan mengimplementasikan Program Pekerja Anak Nasional. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional dan menerapkan Kebijakan Nasional untuk melindungi anak-anak yang terlibat pada pekerja anak, meliputi anak-anak yang diperdagangkan, dan anak-anak rentan lainnya.

3. International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)

Berdasarkan fungsi organisasi internasional, ILO sebagai organisasi internasional telah menjalankan beberapa fungsi dalam menangani eksploitasi anak di India. Melalui penerapan fungsi tersebut, penanganan masalah eksploitasi

anak di India dapat berjalan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan masalah tersebut.

Beberapa fungsi organisasi internasional yakni fungsi informatif, fungsi normatif, fungsi role-creating, fungsi role-supervisory, dan fungsi operasional. Dalam menjalankan fungsi informatif ILO telah mengeluarkan sebuah informasi yang menginformasikan tentang jumlah pekerja anak di India, yang mengalami penurunan ataupun kenaikan disetiap tahunnya. Selain itu, ILO juga menjalankan fungsi normatif dan fungsi role-creating dengan mengeluarkan sebuah konvensi, protokol, dan rekomendasi yang kemudian ditujukan kepada sejumlah Negara dan wajib menerapkannya. Sementara dalam menjalankan fungsi operasional ILO bekerja sama dengan pemerintah India untuk mengatasi masalah pekerja anak di India, dan dalam menjalankan fungsi role-supervisory ILO menerapkan salah satu program, yaitu IPEC untuk mengurangi atau bahkan menghapus eksploitasi yang ada di India.

Untuk menangani masalah pekerja anak, ILO membentuk *International Programme On The Elimination of Child Labour* (IPEC) pada tahun 1992 dengan tujuan untuk menghapuskan pekerja anak dengan cara memperkuat kapasitas nasional untuk menangani masalah tersebut dan menciptakan gerakan aksi dunia untuk memerangi pekerja anak. *International Labour Organization – International Programme On The Elimination of Child Labour* (ILO-IPEC) merupakan program kerjasama teknis tentang pekerja anak terbesar di dunia. Lebih dari 90 negara, IPEC menginspirasi, mengarahkan dan mendukung usaha nasional untuk menghapus pekerja anak di dunia. Program ILO-IPEC tidak hanya menarik anak-anak dari pekerja anak, tetapi juga menyediakan pendidikan untuk para pekerja anak dan membantu keluarga mereka. (Pratiwi, 2018)

Proyek berkelanjutan yang membantu mengurangi tingkat pekerja anak yaitu dapat menerapkan proyek sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka kerja kebijakan, hukum dan peraturan untuk memberantas pekerja anak dan pekerja paksa di beberapa sektor, dengan cara :
 - a. Meninjau kerangka kerja kebijakan, hukum, dan peraturan untuk mengidentifikasi kesenjangan, memberikan rekomendasi nyata dan melakukan revisi yang diperlukan, sejalan dengan Standar Perburuhan Internasional.
 - b. Memetakan rantai pasokan kapas, tekstil dan garmen dengan mempertimbangkan prinsip dan hak mendasar di tempat kerja.
 - c. Membangun kapasitas negara-negara target untuk menghapuskan anak dan kerja paksa.
 - d. Memperkuat peran organisasi pengusaha dalam menghapuskan anak dan kerja paksa.
 - e. Memperkuat kapasitas organisasi pekerja dan pekerja produksi kapas, tekstil dan garmen untuk menggunakan hak mereka atas kebebasan berserikat dan hak-hak dasar pekerja lainnya.
2. Mendukung pemerintah daerah, penyedia layanan publik, dan pemangku kepentingan lain yang relevan untuk mengambil tindakan efektif untuk menghentikan pekerja anak dan pekerja paksa di seluruh wilayah di India :
 - a. Mengembangkan pemantauan kepatuhan multi-pemangku kepentingan berbasis masyarakat dan mekanisme perbaikan untuk memerangi pekerja anak dan kerja paksa dengan fokus tambahan pada masalah gender.

- b. Mendukung inisiatif uji tuntas dan mekanisme pengaduan terkait pekerja anak dan kerja paksa di sepanjang rantai nilai.
- c. Memperkuat mata pencaharian keluarga lokal dan rentan.
- d. Mengembangkan model ketenagakerjaan pemuda dan wanita dan skema wirausaha dan fungsi pendukungnya.
- e. Tingkatkan akses anak-anak ke pendidikan. (International Labour Organization, 2018)

Program kerjasama teknis ILO adalah Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak atau International Program for the Elimination of Child Labour (IPEC) yang bertujuan mewujudkan terhapusnya pekerja anak dengan memperkuat kapasitas nasional untuk mengatasi masalah pekerja anak dan menciptakan gerakan di seluruh dunia untuk memerangi fenomena pekerja anak. Program-program tersebut dijalankan dengan program aksi IPEC diantaranya:

1. Child Labour Monitoring (CLM) atau Pemantauan Buruh Anak Pemantauan Buruh Anak adalah proses aktif yang memastikan bahwa observasi tersebut diletakkan pada tempatnya dan dikoordinasikan secara tepat. Tujuan keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa sebagai konsekuensi dari pemantauan anak-anak dan pekerja muda yang dipekerjakan secara hukum aman dari eksploitasi dan bahaya tempat kerja. Pengawasan aktif dari pekerja anak di tingkat lokal didukung oleh sistem rujukan yang menetapkan hubungan antara layanan yang tepat dan mantan pekerja anak.
2. Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggungjawab Sosial, yang dimana perusahaan IPEC bekerjasama dengan perusahaan-

perusahaan dalam menangani masalah pekerja anak yang memungkinkan anak dapat bekerja di perusahaan manufaktur, banyak pekerja anak bekerja di perusahaan manufaktur, banyak pekerja anak bekerja dan terlibat dalam produksi tanaman dan barang-barang manufaktur yang diekspor secara langsung, serta dalam produksi barang yang berfungsi sebagai input menjadi produk akhir perakitan atau finishing dari produk ini sering terjadi di negara-negara pengimpor yang membahayakan keselamatan, sebagai pengakuan atas peran penting bahwa perusahaan harus bermain untuk menghapuskan pekerja anak dan tidak mengeksploitasi dan tidak menjadikan anak sebagai pekerja dalam perusahaan.

3. Education (Pendidikan). Pendidikan adalah komponen penting dari setiap upaya yang efektif untuk menghilangkan pekerja anak. IPEC telah menunjukkan kepemimpinan dan pengalaman dalam menggunakan pendidikan untuk memerangi pekerja anak di kedua pengaturan formal dan non-formal yang telah terbukti signifikan dalam pencegahan pekerja anak dan rehabilitasi mantan pekerja anak. Pendidikan non-formal atau transisi telah memainkan peran penting rehabilitasi mantan pekerja anak. Pendidikan kejuruan dalam rehabilitasi mantan pekerja anak. Pendidikan kejuruan dan pelatihan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah nasional. Selain itu, IPEC telah memberikan saran kebijakan dan bantuan teknis kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang berisiko bekerja.

4. Labour Inpection (Tinjauan Pekerja), untuk mengatasi pekerja anak berbahaya dapat memberikan informasi tentang pekerja anak berbahaya bagi pengusaha dan pekerja termasuk saran tentang cara untuk menghilangkan pekerja anak. Mereka juga dapat menggunakan kekuatan penegak hukum di tempat kerja untuk memastikan bahwa, (1) anak-anak ditarik dari tempat kerja dimana pekerjaan berbahaya berlangsung, dan dicabut pihak yang berwenang yang kemudian bisa mendapatkan mereka ke sekolah atau pelatihan keterampilan; (2) kesehatan dan keselamatan anak-anak yang telah mencapai usia legal minimum untuk bekerja (14-17 tahun tergantung pada negara) dilindungi sepenuhnya di tempat bekerja. Perlindungan dapat dipastikan melalui kombinasi dari perbaikan kesehatan umum di tempat kerja dan kondisi keamanan dan menghindari anak-anak melaksanakan pekerjaan berbahaya.
5. The Time Bound Programme TBP) atau Program Terikat Waktu Program Terikat Waktu merupakan salah satu sarana pendekatan oleh IPEC untuk membantu negara peratifikasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi, program terikat waktu dirancang sebagai sebuah rencana kerja untuk suatu negara dalam menentukan kebijakan yang terpadu dan terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerja anak dengan rencana aksi, program terikat waktu merancang rencana aksi untuk menentukan kebijakan yang bertujuan memerangi kemiskinan dan akar penyebab pekerja anak, memajukan pendidikan dasar, dan mobilisasi sosial. (Manurung, 2008)

Selain memberikan dukungan keuangan untuk program-program aksi yang dilakukan seperti rehabilitasi, integrasi sosial, memberikan alternatif pendidikan. IPEC juga kooperatif dengan pemerintah sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang buruh anak. IPEC juga memberi pelayanan sosial, advokasi serta peningkatan kesadaran akan buruh anak. Sebagian besar proyek nasional IPEC adalah desentralisasi, mengadaptasi strategi dan menerapkan prinsip-prinsip mana yang paling dibutuhkan di tingkat negara dan grassroot. (Web Unej, 2016)

Kesimpulan

Tingginya tingkat pekerja anak di India mengharuskan ILO (International Labour Organization) untuk mencanangkan sebuah upaya dalam memberantas pekerja anak di dunia. Khususnya di India. Upaya yang dicanangkan ILO untuk mengurangi atau bahkan menghapus pekerja anak di India adalah dengan mencanangkan sebuah program, yakni program IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour). Program tersebut terdiri dari beberapa proyek yang bertujuan untuk menghapus pekerja anak di India.

ILO juga menjalin kerjasama dengan pemerintah India untuk menghapus pekerja anak tersebut. Kerjasama yang dijalin antara ILO dan pemerintah India membuat India kemudian mencanangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait cara hukum India menangani masalah pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. (2016). *India Izinkan Anak DIBawah 14 Tahun Bekerja untuk Keluarga*. Jakarta: BBC.com.
- Childlineindia.org. (n.d.).
- Harsh Adithya Poddar, R. P. (n.d.). Analysis of Statistics Relating to Child Labour in India. *Kol Paper On Child Labour* , 1-7.
- International Labour Organization. (2007). Sekilas tentang ILO. 1-5.
- International Labour Organization. (2017). Dalam Konflik dan Bencana, Lindungi Anak Agar Tidak menjadi Pekerja Anak.
- International Labour Organization. (2018).
- International Labour Organization. (n.d.).
- Jena, N. R. (2016). Child Labour in India : A state-wise account and the role of Micro, Small and Medium Enterprises. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 12-15.
- Jurnal UIN Surabaya. (2014). Eksploitasi Pekerja Anak Jalanan dalam Pendekatan Feminis Sosialis. *BAB II Jurnal UIN Surabaya*, 28-31.
- Manurung, M. R. (2008). Kerjasama ILO (International Labour Organization) Dan Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Di Indonesia (2004-2009). *Jurnal*, 3-4.

Okusa, M. (2008). Child Labor In Asia: Challenges And Resposes of the International Labour Organization in Thailand and India . *Okusa Maki*.

Pratiwi, T. J. (2018). Implementasi International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) dalam Mendukung Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015. *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional, Fisip, Universitas Mulawarman*.

Putri, C. M. (2016). Peran International Labour Organization (ILO) terhadap Pelanggaran HAM berupa Perdagangan Orang yang Terjadi pada Anak Buah Kapal (ABK). *Jurnal Skripsi*, 1-4.

rmol.co. (2016). *Pekerja Anak Menurun Lebih Dari 60 Persen, India Rencanakan Ubah UU*. Jakarta: rmol.co.

Roy, N. N. (2017). A Critical Analysis of Child Labour in India. *International Journal of Current Research in Multidisciplinary*.